

		Namor SOP		1	PIDI-STID/ JUNI /	/ 2021			
		Igi. Disankan		JUNI JOH					
6		Tgl. Diberlakukan							
1	SOP DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD			- 1		DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTATIOARST	R INDONESIA - STTD	Ð	
	BEKASI	Ditetapkan oleh				The state of the s			
4		0				HINDROSORAHMA	BRAHMAT, ATD., M.SI		
						Pem j fina Utama Madya (IV/d) NIP. 19640127 198703 1 013	adya (IV/d) 8703 1 013		
		SOP PENGADA/	AN DAN PENER	SOP PENGADAAN DAN PENERIMAAN SARANA DAN PRASARANA	ASARANA				
DASAR HUKUM:	(UM :		C	CARA MENGATASI:					
1. UU RI No	1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional		1	. Harus melaksanakan kegi	1. Harus melaksanakan kegiatan pengadaan dan penerimaan sarana dan prasarana	imaan sarana dan pras	arana		
2. UU RI No	2. UU Ri No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		2	. Kepala sub bagian kepega	2. Kepala sub bagian kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga harus mengikuti kegiatan pengadaan dan penerimaan sarana dan prasarana	ah tangga harus meng	ikuti kegiatan pengad	aan dan penerimaan s	sarana dan prasarana
3. Peratura	3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. PM 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	tandar Nasional Pendidikan T		Staf sub bagian kepegawa	kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga harus mengikuti kegiatan pengadaan dan penerimaan sarana dan prasarana	tangga harus mengiku	iti kegiatan pengadaa	n dan penerimaan sar.	ana dan prasarana
4. Peraturan STTD Bekasi	4. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 50 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Bekasi	Politeknik Transportasi Darai	t Indonesia						
5. Peratura	5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. PM 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	istem Penjaminan Mutu Penc	didikan						
6. Peratura	6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 104 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD	portasi Darat Indonesia STTD							
7. Peratura Prosedur di	7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan	ta Proses Bisnis dan Standar (Operasional						
	Annual Proposed de la monoco de militar de Colonia de Maria de Mar								
KETERKAITAN:	N:		P	PERALATAN:					
			2	Komputer Printer					
			3	3. Alat Tulis Kantor (ATK)					
PERINGATAN:	N:								
Apabila SOF	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pengadaan dan penerimaan sarana dan prasarana akan terlambat	rana akan terlambat		Pelaksana			Mutu Baku		
No	Uraian Jenis Kegiatan	Panitia	Panitla Pengadaan	Kasubbag Kepegawaian, TU, dan RT; PPK; Bendahara Materiil	Kabag Keuangan dan Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima DIPA dan POK				0		15 menit		
2.	Melaksanakan rapat anggaran umum						3 jam		
ţu.	Melaksanakan rapat internal Subbag Kepegawalan, TU, dan RT			-			2 jam		
4.	Menjadualkan pengadaan						2 Jam		

15	14.	13.	12.	11	10.	9	œ	7.	ō	ò	
Melakukan penyimpanan data	Melakukan Penyimpanan/ pendistribusian	Melakukan Serah Terima barang	Melakukan perbaikan/ganti sarana	Melaksanakan rapat perbaikan barang	Memeriksa barang apakah memenuhi syarat atau tidak	Melaksanakan Pengadaan	Melakukan pelelangan dan melakukan kontrak	Menyiapkan SP PPK serta membentuk panitia	Menyiapkan SP Tim pengadaan	Menentukan apakah barang berharga kurang dari 10 juta	
0*				γ ₃	Tidak					ã V	-()
							•			Tidak	
	Surat Serah Terima				Spesifikasi Barang						
1 jam	1 jam	1 jam	2 hari	3 jam	1 hari	2 hari	3 hari	1 hari	1 hari	1 jam	
Arsip											
						Pertanggungjawaban (kwitansi)					